

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam era digitalisasi yang berkembang semakin pesat, komunikasi publik menjadi salah satu faktor penting dalam membentuk pemahaman masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Transformasi digital tidak hanya mengubah cara informasi disampaikan, tetapi juga memengaruhi bagaimana masyarakat menilai kredibilitas, keahlian, dan integritas seorang komunikator kebijakan. Dalam perspektif ilmu komunikasi, efektivitas penyampaian pesan tidak hanya bergantung pada isi pesan itu sendiri, tetapi juga pada karakteristik komunikator yang menyampaikan pesan tersebut. Oleh karena itu, kredibilitas pejabat publik memegang peranan strategis dalam membentuk pemahaman, sikap, dan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan negara (Perloff, 2020).

Salah satu isu kebijakan yang sering menjadi perhatian publik adalah kebijakan fiskal pemerintah. Fenomena fiskal merujuk pada berbagai kondisi, dinamika, dan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara, seperti defisit anggaran, subsidi energi, utang negara, kebijakan pajak, serta pengelolaan belanja negara yang berdampak langsung pada stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Instrumen utama dalam kebijakan fiskal adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yaitu rencana keuangan tahunan pemerintah yang memuat pendapatan negara, belanja negara, serta pembiayaan yang digunakan untuk menjalankan berbagai program pembangunan nasional. APBN menjadi instrumen utama pemerintah dalam mengelola perekonomian nasional sekaligus menjaga stabilitas ekonomi negara (OECD, 2024).

Namun demikian, isu-isu fiskal sering kali bersifat kompleks dan teknis sehingga tidak mudah dipahami oleh masyarakat umum. Informasi mengenai defisit anggaran, rasio utang negara, maupun kebijakan subsidi energi sering kali disampaikan dalam bentuk data ekonomi yang memerlukan pemahaman konseptual tertentu. Kondisi ini menyebabkan munculnya kesenjangan pemahaman antara

kebijakan fiskal yang bersifat teknokratis dengan kemampuan masyarakat dalam memahami makna kebijakan tersebut. Oleh karena itu, kemampuan pejabat publik dalam menjelaskan fenomena ekonomi secara jelas, kredibel, dan komunikatif menjadi kebutuhan yang semakin penting agar kebijakan fiskal dapat dipahami secara rasional oleh masyarakat luas (Perloff, 2020).

Sejak tahun 2025, Purbaya Yudhi Sadewa menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia, menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Sebelum menjabat sebagai menteri, Purbaya dikenal luas sebagai ekonom senior dan pernah menjabat sebagai Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Rekam jejak profesional tersebut membentuk reputasinya sebagai figur teknokrat dengan keahlian mendalam di bidang kebijakan makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan. Selain kapasitas keilmuan, Purbaya juga dikenal memiliki gaya komunikasi yang rasional, berbasis data, dan relatif mudah dipahami oleh publik (Kemenkeu.go.id, 2025). Reputasi ini memperkuat posisinya sebagai salah satu pejabat publik dengan tingkat kepercayaan tinggi dalam isu ekonomi nasional (Katadata, 2026).

Dalam menjalankan fungsi komunikasi publik, Purbaya Yudhi Sadewa tidak hanya menyampaikan informasi melalui forum resmi pemerintahan, tetapi juga memanfaatkan media digital sebagai sarana komunikasi langsung dengan masyarakat. Ia aktif menjelaskan isu ekonomi nasional melalui akun media sosial pribadinya, khususnya pada platform TikTok dan Instagram. Melalui platform tersebut, Purbaya kerap membagikan penjelasan mengenai kondisi APBN, dinamika defisit anggaran, kebijakan subsidi, serta strategi pengelolaan utang negara dengan pendekatan yang lebih komunikatif dan mudah dipahami oleh publik. Pemanfaatan media sosial ini menunjukkan adanya perubahan pola komunikasi pemerintahan yang semakin terbuka, interaktif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi (Gregory, 2021; Grunig, 2017).

Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi, tetapi juga sebagai ruang komunikasi publik yang memungkinkan interaksi langsung antara pejabat pemerintah dan masyarakat. Dalam konteks komunikasi

digital, penyampaian informasi kebijakan tidak lagi bersifat satu arah, melainkan berkembang menjadi komunikasi yang lebih dialogis dan partisipatif. Hal ini sejalan dengan model komunikasi dua arah simetris yang dikemukakan oleh Grunig (2017), di mana komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat memerlukan transparansi informasi serta keterlibatan publik dalam memahami kebijakan negara.

Meskipun informasi ekonomi semakin mudah diakses melalui media digital, tingkat pemahaman masyarakat terhadap isu fiskal masih relatif terbatas. Berdasarkan survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2025), tingkat literasi keuangan nasional baru mencapai 50,68%, sementara literasi fiskal masyarakat bahkan diperkirakan masih berada di bawah angka tersebut. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena pemahaman masyarakat terhadap kebijakan fiskal sangat penting dalam membangun partisipasi publik serta meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara.

Fenomena tersebut menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan karakteristik Generasi Z sebagai generasi *digital-native*. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2025), Generasi Z mencakup sekitar 27,9% populasi Indonesia dan merupakan kelompok masyarakat yang paling aktif mengakses informasi melalui media digital. Dalam penelitian ini, Generasi Z dibatasi pada kelompok usia 17–29 tahun yang merupakan kelompok usia produktif muda yang terbiasa memperoleh informasi melalui media sosial. Generasi ini memiliki karakteristik konsumsi informasi yang cepat, visual, dan interaktif, sehingga efektivitas komunikasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh cara penyampaian pesan dan kredibilitas komunikator.

Menurut teori kredibilitas sumber yang dikemukakan oleh Hovland, Janis, dan Kelley (2017), efektivitas komunikasi persuasif sangat dipengaruhi oleh kredibilitas komunikator yang terdiri dari tiga dimensi utama, yaitu keahlian (*expertise*), kepercayaan (*trustworthiness*), dan daya tarik komunikator (*attractiveness*). Dalam konteks komunikasi kebijakan ekonomi, kredibilitas sumber menjadi faktor penting yang memengaruhi sejauh mana pesan kebijakan

dapat diterima, dipahami, dan dipercaya oleh audiens. Seorang komunikator yang memiliki keahlian dan integritas tinggi akan lebih mudah meyakinkan audiens terhadap informasi yang disampaikan.

Penelitian terdahulu oleh Santoso (2022) dan Nugroho (2022) menunjukkan bahwa kredibilitas pejabat publik berkontribusi signifikan terhadap penerimaan kebijakan ekonomi oleh masyarakat. Akan tetapi, penelitian-penelitian tersebut masih berfokus pada audiens umum dan belum secara spesifik menyoroti kelompok Generasi Z sebagai generasi *digital-native*. Di sisi lain, Pratiwi (2023) menemukan bahwa efektivitas komunikasi digital pejabat ekonomi sangat dipengaruhi oleh gaya naratif serta kesesuaian format pesan dengan karakteristik audiens muda.

Perubahan lanskap komunikasi di media sosial juga menuntut pejabat publik untuk menyesuaikan cara berkomunikasi. Dalam ruang digital, kredibilitas tidak hanya ditentukan oleh jabatan formal, tetapi juga oleh konsistensi pesan, kejelasan informasi, serta kemampuan komunikator dalam menjelaskan isu yang kompleks secara kontekstual (Indah, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan komunikasi kebijakan di era digital tidak hanya bergantung pada substansi pesan, tetapi juga pada bagaimana pesan tersebut dikemas dan disampaikan kepada audiens.

Literasi fiskal sendiri merupakan indikator penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kebijakan keuangan negara. OECD (2024) menegaskan bahwa tingkat pemahaman fiskal masyarakat berkorelasi positif dengan akuntabilitas pemerintah serta tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Di Indonesia, (Sina 2020; Widdowson dan Hailwood 2016) menekankan pentingnya edukasi fiskal yang komunikatif dan mudah dipahami agar masyarakat mampu memahami konsekuensi kebijakan anggaran secara rasional.

Namun demikian, sebagian besar penelitian literasi ekonomi di Indonesia masih berfokus pada literasi keuangan personal, seperti pengelolaan keuangan individu dan investasi, bukan pada literasi fiskal publik (Saleem, 2021; Zulkarnain, 2021). Rahmawati (2023) bahkan menemukan bahwa mahasiswa cenderung

memahami isu utang negara secara parsial akibat kurangnya penyampaian informasi fiskal yang sederhana dan kontekstual. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi pejabat publik dalam menjelaskan fenomena fiskal masih menjadi tantangan tersendiri.

Dari sisi metodologi, pendekatan kuantitatif eksplanatori dinilai relevan untuk mengukur pengaruh kredibilitas komunikator terhadap pemahaman publik secara objektif. (Creswell, 2018) dan (Sugiyono, 2019) menyatakan bahwa pendekatan ini memungkinkan pengujian hubungan kausal antarvariabel secara terukur melalui instrumen penelitian yang sistematis. Dengan menggunakan skala Likert dan analisis statistik inferensial (Ghozali, 2021), penelitian ini diharapkan mampu memberikan bukti empiris mengenai sejauh mana kredibilitas Purbaya Yudhi Sadewa berpengaruh terhadap pemahaman fenomena fiskal Generasi Z.

Dalam konteks komunikasi pemerintahan, Ruslan (2019) menekankan bahwa keberhasilan komunikasi publik tidak hanya diukur dari tersampainya pesan, tetapi juga dari perubahan tingkat pemahaman dan sikap khalayak. Oleh karena itu, kredibilitas Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menjadi variabel strategis dalam memperkuat hubungan komunikasi antara pemerintah dan generasi muda sebagai kelompok penerus pembangunan ekonomi nasional.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kredibilitas Purbaya Yudhi Sadewa dalam menjelaskan isu ekonomi nasional melalui media sosial terhadap pemahaman fenomena fiskal pada Generasi Z di Indonesia, khususnya pada pengikut akun TikTok dan Instagram pribadinya.

1.2 Rumusan masalah

Apakah kredibilitas Purbaya Yudhi Sadewa sebagai sumber informasi ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemahaman fenomena fiskal nasional pada Generasi Z Indonesia?

1.3 Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis pengaruh kredibilitas Purbaya Yudhi Sadewa dalam menjelaskan isu ekonomi nasional terhadap tingkat pemahaman fenomena fiskal pada Generasi Z.

1.4 Manfaat penelitian

Hasil dari penelitian ini memiliki kegunaan baik secara teoritis maupun praktis yang dapat dipaparkan sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu komunikasi publik dan literasi ekonomi, khususnya dalam memahami bagaimana kredibilitas komunikator publik memengaruhi tingkat pemahaman fiskal masyarakat muda. Penelitian ini menguji relevansi Teori Kredibilitas Sumber (*Source Credibility Theory*) karya Hovland, Janis, dan Kelley (2017) dalam konteks komunikasi ekonomi pemerintahan modern, di mana figur pejabat publik seperti Purbaya Yudhi Sadewa berperan sebagai penyampai kebijakan fiskal melalui media massa dan platform digital. Melalui pendekatan kuantitatif, penelitian ini berupaya menilai konsistensi tiga dimensi utama kredibilitas keahlian (*expertise*), kepercayaan (*trustworthiness*), dan daya tarik (*attractiveness*) dalam meningkatkan pemahaman generasi Z terhadap fenomena fiskal nasional.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Kementerian Keuangan dan lembaga pemerintah lainnya dalam merancang strategi komunikasi fiskal yang efektif, transparan, dan relevan dengan karakteristik Generasi Z. Dengan menguji pengaruh kredibilitas Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan terhadap pemahaman fiskal generasi muda, penelitian ini memberikan wawasan empiris bagi pejabat publik dan praktisi *Government Public Relations* (GPR) untuk mengoptimalkan penyampaian kebijakan ekonomi melalui pendekatan yang kredibel, edukatif, dan berbasis data. Hasil penelitian ini juga

diharapkan menjadi dasar pengembangan strategi komunikasi publik berbasis kepercayaan (*trust-based communication*) yang dapat meningkatkan literasi fiskal masyarakat, memperkuat hubungan antara pemerintah dan publik muda, serta mendukung reputasi positif lembaga keuangan negara di era digital.

1.5 Sistematika Penulisan

Guna mempermudah pembaca dalam mengetahui pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini secara menyeluruh, sistematika penulisan penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

Pada pendahuluan pembahasan mengenai latar belakang permasalahan yang penulis ambil, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pembahasan tinjauan pustaka terdiri dari sub bab penelitian terdahulu, kebaruan riset, landasan teori, kerangka konseptual, hipotesis dan kerangka pemikiran.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam metodologi penelitian, membahas mengenai paradigma penelitian, pendekatan penelitian, metode penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, operasionalisasi variabel, metode pengumpulan data, instrumen penelitian, metode analisis data, uji instrumen penelitian, serta lokasi dan waktu penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada hasil dan pembahasan terdiri dari gambaran hasil penelitian serta analisa pembahasan hasil penelitian

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh hasil penelitian. Pada kesimpulan dikemukakan masalah yang ada pada penelitian, sedangkan saran berisi masukan untuk mengatasi permasalahan yang ada.

